

**PERAN PANITIA PEMILIHAN UMUM AKSES PENYANDANG
CACAT (PPUA PENCA) DALAM SOSIALISASI POLITIK BAGI
MASYARAKAT DIFABEL DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DKI JAKARTA 2013**

Oleh

Oktaviawan Yandarisman

D2B009060

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Election is one form of political participation . Every citizen has the right to participate in the General Election without exception . So also with people with disabilities . Communities with special needs is also entitled to participate in the election .. This study aims to examine the role of political socialization PPUA Disabled in the Jakarta gubernatorial election in 2013 for the people with disabilities . Disabled PPUA as NGOs do play a role in political socialization of people with disabilities in the elections , in order to obtain equal rights and obligations in politics , so there is no gap between people with disabilities with the community at large . Governor Election is one means of political participation for people with disabilities who participate in it PPUA Disabled . Socialization process is carried out to the people with disabilities to socialize through seminars conducted in five areas of Jakarta and through methods of mentoring as a form of responsibility on Disabled PPUA as agencies that serve and assist the electoral process for people with disabilities

Keywords: PPUA Disabled, Role, People with disabilities, Socialization

ABSTRAK

Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Setiap warga negara berhak untuk ikut serta didalam Pemilihan Umum tanpa terkecuali. Begitu juga dengan masyarakat difabel. Masyarakat dengan kebutuhan khusus ini juga berhak ikut dalam pemilu.. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang peran PPUA Penca dalam sosialisasi politik dalam pemilihan umum gubernur DKI Jakarta 2013 bagi masyarakat difabel. PPUA Penca sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat ikut berperan dalam melakukan sosialisasi politik terhadap masyarakat difabel dalam pemilu, agar mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban dalam bidang politik, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat difabel dengan masyarakat pada umumnya. Pemilihan Gubernur merupakan salah satu sarana partisipasi politik bagi masyarakat difabel yang didalamnya ikut berperan PPUA Penca. Proses sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat difabel adalah adanya sosialisasi melalui

seminar yang dilaksanakan di 5 wilayah DKI Jakarta dan melalui metode pendampingan sebagai bentuk tanggung jawab PPUA penca sebagai lembaga yang melayani dan mendampingi proses pemilihan umum bagi masyarakat difabel

Kata kunci: PPUA PENCA, Peran, Masyarakat Difabel, Sosialisasi

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa pada umumnya memberikan pengertian bahwa adanya kesempatan bagi rakyat untuk ikut memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupannya. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu-Pemilu merupakan sarana partisipasi yang paling mudah tetapi juga sulit. Pemilu yang diselenggarakan oleh setiap negara haruslah bersifat inklusi sebagai syarat demokrasi, yang berarti tidak boleh ada orang atau kelompok orang (dengan dasar pengelompokan apapun, misalnya: ras, suku, kondisi fisik) yang diabaikan haknya sebagai Pemilih atau haknya sebagai yang dipilih.

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.¹ Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat. Proses Sosialisasi ini merupakan hal yang vital, yang menentukan sikap masyarakat dalam partisipasi politik.

Pada pemilihan umum, Masyarakat Difabel juga berhak untuk ikut berpartisipasi. Masyarakat difabel selama ini kurang sekali terdengar. Masyarakat kebanyakan lebih mengenal kata "cacat". Difabel (Different Ability) adalah seseorang yang keadaan fisik atau sistem biologisnya berbeda dengan orang lain pada umumnya atau dengan kata lain disebut masyarakat penyandang cacat. Menurut UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang cacat sebagai berikut: "Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya². Secara konvensional, yang termasuk penyandang cacat fisik adalah tunanetra, tunarungu dan tunadaksa, dan yang tergolong penyandang cacat mental adalah tunagrahita. Mereka yang menyandang kedua kategori kecacatan fisik dan mental, kita kenal dengan istilah tunaganda. Berdasarkan catatan World Health Organization (WHO), jumlah penyandang disabel di dunia mencapai 15 persen dari total penduduk, sementara jumlah penyandang disabel di kawasan Asia Tenggara mencapai 60 juta orang dari sekitar 600 juta penduduk.

Untuk menunjang masyarakat cacat ini didalam pemilu, maka dibentuklah PPUA. PPUA adalah Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), selinggga penyelenggaraan pemilu mudah diakses dan tidak diskriminatif bagi penyandang cacat. PPUA merupakan mitra-kerja KPU sejak tahun.2004.Dasar Hukum PPUA penca adalah Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 pasal 21 ayat 1,2,3.

¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Grasindo, 1992 hal 117

² UU No 4 Tahun 1997

Organisasi ini mewadahi para penyandang cacat atau masyarakat difabel untuk menggunakan hak pilihnya didalam pelaksanaan pemilu. Masyarakat difabel sama dengan masyarakat normal lainnya berhak untuk mendapatkan hak pilihnya didalam pemilu. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan masyarakat yang berkebutuhan khusus ini dibanding masyarakat pada umumnya. PPUA Penca berusaha mewadahi masyarakat atau kaum Difabel didalam memberikan aspirasi politiknya. Organisasi ini berusaha untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat Difabel agar golongan masyarakat ini menjadi lebih mudah didalam mengikuti pemilu. Pemerintah ataupun KPU perlu untuk meningkatkan fasilitas bagi penyandang cacat agar mempermudah mereka didalam memberikan haknya didalam pemilu.

Adapun Identifikasi Masalah yang menyangkut tentang peran PPUA Penca dalam sosialisasi politik bagi masyarakat difabel dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2013 :

1. Peran PPUA yang sangat besar dalam proses sosialisasi politik bagi masyarakat difabel, sehingga memberikan dampak yang cukup besar dalam pola pikir masyarakat difabel terhadap pemilu
2. Bantuan atau fasilitas yang diberikan terhadap masyarakat difabel sangat berarti dalam proses pencoblosan pemilu, sehingga masyarakat difabel dapat terbantu dengan adanya bantuan tersebut.
3. Proses sosialisasi yang dilakukan atas kerjasama PPUA Penca, KPU dan Bawaslu, telah dapat mencakup sebagian besar masyarakat difabel yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Dari data-data tersebut diatas menarik minat saya untuk meneliti tentang peran PPUA penca dalam proses sosialisasi politik bagi masyarakat difabel dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2013. PPUA penca sebagai lembaga Independen yang berdiri untuk memberikan bantuan kepada masyarakat difabel melalui seminar yang diadakan selain itu PPUA Penca juga melakukan pendampingan selama proses pemilihan umum, agar masyarakat difabel kedepannya menjadi mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Selain itu PPUA penca juga memperjuangkan kesetaraan hak dan kewajiban masyarakat difabel agar sama seperti masyarakat pada umumnya, dalam hal ini yaitu dibidang politik.

KERANGKA TEORI

1. Sosialisasi Politik

Sosialisasi Politik menurut Gabriel A. Almond adalah proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikakn langsung oleh tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.

3. Teori Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut Instruksi Mendagri No. 8/1990 Lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun kelompok orang yang secara sukarela

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang digambarkan dengan kata-kata tertulis dan lisan melalui pengamatan perilaku untuk memahami berbagai hal yang berkaitan dengan Peran Panitia Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat di Provinsi DKI Jakarta.

Peneliti melakukan pengumpulan dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Info yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa pihak yang dianggap memiliki pengaruh penting dalam sosialisasi politik pada masyarakat difabel. Berdasarkan pertimbangan secara empiris, yang dipertimbangkan dengan penyesuaian perumusan masalah penelitian dan juga tujuan penelitian maka beberapa pihak yang dimaksudkan relevan dalam kriteria tersebut diantaranya adalah :

1. Ketua Umum PPUA Penca
Ketua Umum PPUA Penca adalah orang yang memiliki tugas untuk menggagas dan mengadakan sosialisasi politik ini. Ketua Umum PPUA Penca juga adalah yang bertindak sebagai narasumber dalam seminar sebagai bagian dari sosialisasi politik. Dengan beliau sebagai informan diharapkan akan mendapat data dan keterangan detail tentang proses sosialisasi bagi masyarakat difabel di Provinsi DKI Jakarta.
2. Dua Orang Penyandang Disabilitas
Penyandang Disabilitas adalah orang yang menjadi objek didalam proses sosialisasi politik yang diadakan oleh PPUA penca. Dengan menjadikan beliau-beliau sebagai informan, diharapkan akan mendapat data dan keterangan berkaitan dengan proses Sosialisasi Politik ini. Sehingga data yang didapatkan menjadi lebih akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yang diteliti yaitu tentang PPUA Penca sebagai lembaga atau organisasi yang mengadakan sosialisasi bagi masyarakat difabel dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, sehingga PPUA memiliki peran yang sangat vital dalam proses sosialisasi politik ini. Dengan jumlah masyarakat difabel di DKI Jakarta yang mencapai 9.178 jiwa, jumlah suara yang masuk cukup mempengaruhi.

PPUA Penca memiliki visi Terselenggaranya pemilihan umum yang aksesibel dan non diskriminatif, sehingga menjamin penyandang disabilitas dapat secara langsung, bebas, rahasia dan mandiri menyalurkan aspirasi politiknyaserta penyandang disabilitas mendapatkan kesamaan kesempatan menjadi calon anggota legislatif. Sedangkan untuk misinya adalah berusaha untuk menciptakan adanya kesamaan hak dan kesetaraan perlakuan bagi penyandang disabilitas dalam menyampaikan hak berpolitik untuk memilih dan dipilih. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, PPUA Penca mengadakan sosialisasi untuk masyarakat difabel.

Peran PPUA Penca dalam proses sosialisasi politik berfokus pada 4 hal yaitu :

- a. Mengadakan seminar yaitu tentang pendidikan pemilih disabilitas dan simulasi Pemilu Akses di 5 Kota Madya yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
- b. Memberikan bantuan dan fasilitas kepada masyarakat difabel agar dapat melakukan pencoblosan dengan lancar dan tepat sasaran.

- c. Melakukan pendampingan terhadap masyarakat difabel selama proses sosialisasi sampai waktu pencoblosan.

Proses sosialisasi politik yang berupa seminar yaitu dengan mengundang 3 narasumber dan pembicara yaitu dari PPUA Penca, KPU dan dari Bawaslu. Didalam pelaksanaannya, PPUA Penca berupaya memfasilitasi seluruh masyarakat difabel yang ada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan cara melakukan pendampingan kepada masyarakat difabel. Salah satu bentuk proses sosialisasi yang dilakukan oleh PPUA penca adalah memberi contoh tentang penggunaan template sebagai alat bantu coblos bagi masyarakat difabel. Untuk tuna daksa PPUA Penca bekerjasama dengan KPU untuk merintis atau mengusahakan pembuatan TPS yang aksesibel bagi masyarakat difabel. Aksesibel yang dimaksud adalah mampu dijangkau oleh masyarakat difabel, sehingga dapat melakukan pencoblosan di TPS. Sedangkan untuk masyarakat tuna rungu dan tuna wicara, bentuk sosialisasi adalah dengan memberikan materi sosialisasi dalam bentuk cetak.

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh PPUA penca merupakan sosialisasi represif. Artinya sosialisasi yang diadakan tidak ada tekanan atau unsur paksaan dari pihak lain. Diharapkan proses sosialisasi dapat dilaksanakan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain. Dengan adanya proses sosialisasi politik ini masyarakat difabel dapat merubah sikap politiknya. Sikap politik yang dimaksud adalah peserta sosialisasi dikenalkan tentang pentingnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Proses sosialisasi lainnya adalah pendampingan. Salah satu bentuk sosialisasi politik adalah dengan pendampingan kepada masyarakat difabel. Pendampingan adalah aktivitas yang dilakukan oleh kelompok sosial yang bergerak dibidang sosial. Proses pendampingan merupakan bentuk dedikasi dan tanggung jawab PPUA Penca sebagai lembaga sawadaya masyarakat yang mempunyai misi mewujudkan kesetaraan hak dan kesetaraan dalam bidang politik bagi masyarakat difabel. Salah satu hambatan dalam proses sosialisasi adalah sulitnya mendata masyarakat difabel. Selain itu hambatan yang paling dirasakan adalah pemberian fasilitas dikarenakan data yang terbatas. Proses pendampingan dilakukan dengan tiga metode yaitu konsultasi, pembelajaran, dan konseling.

Seminar, sebagai salah satu bentuk sosialisasi politik ini menyampaikan materi yang dianggap oleh masyarakat difabel sangat bermanfaat, diantaranya yaitu dengan pengenalan calon gubernur dan wakil gubernur, tetapi bukan merupakan bentuk kampanye. Selain itu dengan pengenalan calon-calon gubernur dan wakil gubernur, masyarakat difabel diharapkan dapat menjadi lebih paham tentang pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur.

Sosialisasi politik mendapatkan berbagai reaksi dikalangan masyarakat difabel yang diantaranya merasakan manfaat dan dampak yang sangat signifikan sehingga proses sosialisasi seperti ini dapat dilakukan secara terus-menerus dengan lebih melibatkan KPU dan masyarakat luas. Manfaat dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat difabel dalam proses sosialisasi ini adalah PPUA Penca telah menghapuskan diskriminasi dibidang hak sipil dan politik bahwa penyandang disabilitas memiliki hak suara sebagai subjek pembangunan.

Selain ketiga macam sosialisasi tersebut, PPUA Penca juga mengadakan sosialisasi lainnya seperti menghadiri debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, ikut demo “anti politik uang” dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk untuk menjalankan visi dan misinya yaitu membantu masyarakat difabel mendapatkan hak dan kesetaraan khususnya dalam bidang politik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada bab 3 adalah sebagai lembaga yang berfokus pada masyarakat difabel, PPUA penca telah melakukan sosialisasi bagi masyarakat difabel. Proses Sosialisasi yang paling signifikan adalah mengadakan sosialisasi dalam bentuk seminar dengan mengundang pembicara dari KPU Provinsi, Bawaslu Pusat dan dari PPUA penca. Materi yang disampaikan antara lain yaitu pengenalan visi-misi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Tata Cara pencoblosan bagi masyarakat difabel, dan simulasi pemilihan Umum bagi masyarakat difabel. PPUA Penca telah melakukan peran sebagaimana yang telah menjadi visi dan misinya, yaitu fokus terhadap membantu masyarakat difabel di dalam proses pemilu dengan mengadakan sosialisasi. Dengan adanya proses sosialisasi ini, manfaat dan dampak yang dirasakan masyarakat difabel sangat besar dan dapat mengubah persepsi masyarakat difabel tentang politik dan pemilu.

Proses sosialisasi yang dilakukan PPUA Penca kebijakan aksesibilitas penyandang cacat sudah ada, namun dirasa masih kurang memadai untuk mengakomodir seluruh kepentingan penyandang cacat dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diajukan, maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat difabel :
 - a. Masyarakat difabel diharapkan menjadi lebih peka dan membuka diri tanpa harus merasa berbeda dari orang normal yang mengakibatkan kecenderungan menutup diri dari pergaulan.
 - b. Lebih meningkatkan kemampuan, pendidikan agar berguna bagi kehidupan dimasa yang akan datang, menjadi lebih mandiri dan tanpa tergantung pada orang lain.
2. Bagi PPUA Penca
 - a. PPUA Penca diharapkan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses sosialisasi sehingga dapat meningkatkan kualitas sosialisasi politik.
 - b. Pemberian fasilitas kepada masyarakat difabel lebih mencakup banyak lagi, dengan bekerjasama dengan KPU dalam penediaan fasilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, 1978.*Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* .Jakarta: PT Gramedia
- Asfar, Muhammad, 2008. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1995-2004*. Surabaya:Eureka
- Budiarjo, Miriam.1998.*Partisipasi dan Partai Politik, sehuah bunga rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.PT Gramedia
- Budiarjo. Miriam. 1998.*Dasar-dasar ilmu politik*.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dawson, Richard E. dan Kenneth prewitt. 1968, *Political socialization*. Boston, Little, brown and co.
- Haricahyono, Cheppy.1991*Ilmu politik dan Perspektifnya* .Yogyakarta: PT Tiara Wacana
- Pradhanawati, Ari dan Tri Cahyo utomo.2008.*Pemilu dan Demokrasi*.Semarang,: *Fisip Undip, Jalan Mata*

- Rohman, Ahmad Ainur, dkk.2009.*Politik, Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan.Malanti:Alvermoes Press*
- Rush, Michael dan Philip Althoff. *Pengantar Sosiologi politik*. Jakarta: Raja, Grafindo Persada.
- Sanit. Arbi.Partai.1997.*Pemilu dan Demokrasi*.Yogvakarta: Pustaka Pelajar
- Surbakti Ramlan. 1991.*Memahami Ilmu Polilik,Jakarta:P'T. Gamedia widiasarana Indonesia.*
- Syamsuddin Nazaruddin.1993.*Dinamikan Sistem Politik Indonesia*.Jakarta-.P'T.Gamedia
pustaka utama
- UU No 4 Tahun 1997
- UU No 8 Tahun 1985
- UU No 19 Tahun 2011
- Perda DKI Jakarta No 11 Tahun 2011